

**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PULAU
BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**SISI ARNIKA
NPM : 1902110016**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SISI ARNIKA
NPM : 1902110016

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
PULAU BANYAK KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

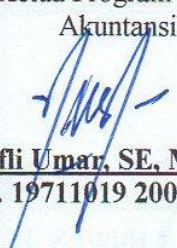
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

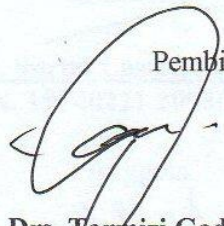
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


L. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SISI ARNIKA
NPM : 1902110016

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
PULAU BANYAK KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 08 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Budi Safatul Anam, SE, M.Si.
NIK. 19790607 201709 2 001



Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



SISI ARNIKA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sisi Arnika
NPM : 1902110044
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2019-2021

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



SISI ARNIKA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan sekaligus selaku

pembimbing kedua penulis.

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Surna Lastri, SE, M.Si Selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1. Landasan Teoritis	9
2.1.1 Keuangan Daerah	9
2.1.2 Dana Desa	10
2.1.3 Akuntabilitas	13
2.1.4 Kompetensi	16
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.6 Partisipasi Masyarakat	23
2.2. Penelitian Sebelumnya	26
2.3. Kerangka Penelitian	31
2.4. Hipotesis	34
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
3.1. Desain Penelitian.....	36
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4. Definisi Operasionalisasi Variabel.....	39
3.5. Teknik Analisis Data.....	41
3.6. Pengujian Data	41
3.6.1 Pengujian Validitas	42
3.6.2 Pengujian Reliabilitas.....	42
3.7. Pengujian Hipotesis.....	43
3.7.1 Uji Parsial (Uji t).....	43
3.7.2 Uji Secara Simultan.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
4.1. Karakteristik Responden	45
4.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	46
4.2.1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	47

4.2.1. Variabel Kompetensi.....	49
4.2.1. Variabel Sistem Pengendalian Internal	50
4.2.1. Variabel Partisipasi Masyarakat.....	51
4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	52
4.3.1. Hasil Uji Validitas.....	52
4.3.1. Hasil Uji Reliabilitas	54
4.4. Hasil Penelitian	55
4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda	55
4.4.2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2).....	56
4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis	57
4.4.3.1. Pengujian Secara Bersama-Sama.....	57
4.4.3.2. Pengujian Secara Parsial	57
4.5. Pembahasan.....	58
4.5.1. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	58
4.5.2. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	59
4.5.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	60
4.5.4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulau Banyak	
Kabupaten Aceh Singkil	5
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 3.1 Nama Desa Di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	38
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.3 Skala Likert	41
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	45
Tabel 4.2 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	47
Tabel 4.3 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kompetensi.....	49
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Internal	50
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat.....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	54
Tabel 4.8 Pengaruh variabel bebas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	55
Tabel 4.9 Model Summury	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner	68
Lampiran 2. Data Dari Jawaban Kuisioner	71
Lampiran 3. Identitas Responden.....	72
Lampiran 4. Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	73
Lampiran 5. Persentase Kompetensi (X_1)	74
Lampiran 6. Persentase Sistem Pengendalian Internal (X_2).....	75
Lampiran 7. Persentase Partisipasi Masyarakat (X_3).....	76
Lampiran 8. Reliability & Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)..	77
Lampiran 9. Reliability & Validitas Kompetensi (X_1).....	78
Lampiran 10. Reliability & Validitas Sistem Pengendalian Internal (X_2).....	79
Lampiran 11. Reliability & Validitas Partisipasi Masyarakat (X_3).....	80
Lampiran 12. Regression	81
Lampiran 13. Nilai R Tabel	83

**PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN PULAU
BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SISI ARNIKA
NPM : 1902110016**

Pembimbing I : Surna Lastri, SE, M.Si.

Pembimbing II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji bersama-sama dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Sampel penelitian ini sebanyak 42 apartur desa yang terdiri dari keuchik gampong, sekretaris gampong, kepada dusun, kaur umum, kaur keuangan dan tuha peut. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian secara parsial kompetensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Sistem pengendalian internal juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Partisipasi masyarakat juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Kata kunci: *Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

**THE INFLUENCE OF COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND
COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT
ACCOUNTABILITY IN ISLANDS DISTRICT
MANY ACEH SINGKIL DISTRICT**

**SISI ARNIKA
NPM : 1902110016**

Advisor I : Surna Lastri, SE, M.Si.

Advisor II : Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence of competence, internal control systems and community participation on village fund management accountability in Pulau Banyak District, Aceh Singkil District. Research data was collected through a list of questions / questionnaires and documentation studies. Testing the hypothesis using multiple linear regression analysis, joint test and partial test are intended to determine jointly and partially the effect of the independent variable on the dependent variable at the 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The sample for this study were 42 village apartments consisting of the gampong keuchik, gampong secretary, hamlets, general affairs officer, financial officer and tuha peut. The results of the study simultaneously show that competence, internal control systems and community participation have a significant effect on the accountability of managing village funds in Pulau Banyak District, Aceh Singkil District. Then partially competence has a significant effect on the accountability of managing village funds in Pulau Banyak District, Aceh Singkil District. The internal control system also has a significant effect on the accountability of managing village funds in Pulau Banyak District, Aceh Singkil District. Community participation also has a significant effect on the accountability of managing village funds in Pulau Banyak District, Aceh Singkil District.

Keywords: Competence, Internal Control System, Community Participation and Village Fund Management Accountability

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dituntut agar akuntabel dan transparan. Meningkatkan besarnya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak akan munculnya potensi penyelewengan. Oleh sebab itu, diperlukan peran aparatur untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntabilitas diartikan sebagai mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), pengelolaan ini berawal dari perencanaan, yang nantinya akan di bahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan untuk mewujudkan pembangunan partisipatif dan sebagai penampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan untuk menjadikan acuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah

desa (RKPDDes) dan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDes) untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagai pedoman pembangunan di desa. Setelah pagu dana desa di terima maka dana desa nantinya akan di kelola oleh pemerintah desa beserta perangkat yang melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaanya yaitu dalam kegiatan di wajibkan untuk menghadirkan seluruh masyarakat (Safitri, 2020).

Dana yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa tentu berdampak pada banyak dan luasnya cakupan kegiatan pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang baik tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan desa tanpa adanya aturan-aturan yang di langgar (Syariati, 2022).

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di antaranya kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat (Burhanuddin, 2020).

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Perdana, 2018). Dana desa dikelola dengan tertib dan taat pada undang-undang yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Aparatur desa berkewajiban dalam mengelola dana desa yang ada. Kompetensi aparatur yaitu keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam mengembangkan pembangunan yang optimal (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa dibutuhkan kompetensi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas. Aparatur desa dengan kompetensi yang baik maka akan mendukung keberhasilan dari pengelolaan dana desa.

Selain kompetensi, sistem pengendalian internal juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan

menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Susanti, 2021).

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa (Safitri, 2020).

Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat tingkat realisasi atau persentase pengelolaan dana pada salah satu gampong yang ada di kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulau Banyak
Kabupaten Aceh Singkil

No	Tahun	Anggaran Dana Desa(Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Sisa Dana Desa	Persentase (%)
Desa Pulau Balai					
1	2019	1.502.839.291	1.423.283.244	79.556.047	88,05%
2	2020	1.607.280.458	1.403.892.188	203.388.270	87,34%
3	2021	1.622.782.731	1.632.782.731	(10.00.000)	100,62%
Desa Pulau Baguk					
1	2019	1.720.774.669	1.720.774.669	0	100%
2	2020	1.630.989.742	1.630.989.742	0	100%
3	2021	1.615.448.207	1.615.448.207	0	100%
Desa Teluk Nibung					
1	2019	1.630.284.283	1.630.284.283	0	100%
2	2020	1.650.392.302	1.648.392.320	1.999.982	99,87%
3	2021	1.632.482.449	1.632.482.449	0	100%

Sumber: Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023).

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terjadi bahwa tingkat persentase pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terdapat satu desa yaitu Desa Pulau Balai mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahun yaitu mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 tingkat persentase pengelolaan dana desa di desa Pulau Balai sebesar 88,05% atau dengan sisa dana desa Rp 79.556.047. kemudian pada tahun 2020 tingkat persentase pengelolaan dana desa sebesar 87,34% atau dengan sisa dana desa Rp 203.388.270. selanjutnya kemudian pada tahun 2021 tingkat persentase pengelolaan dana desa di desa Pulau Balai sebesar 100,62% artinya anggaran yang digunakan mengalami minus sebesar Rp 10.000.000, hal ini disebabkan adanya kegiatan yang mendesak atau tidak bisa ditunda pada tahun depan seperti kegiatan pembangunan desa atau sosialisasi masyarakat atau aparatur desa.

Selanjutnya tingkat persentase pengelolaan dana desa di desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dikelola sampai 100%, artinya dana desa yang digunakan oleh desa Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tidak ada tersisa. Kemudian tingkat persentase pengelolaan dana desa di desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2019 dan tahun 2021 dapat dikelola sampai 100%, sedangkan untuk tahun 2020 pengelolaan dana desa di desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terdapat sisa dana desa sebesar Rp 1.999.982 atau kemampuan tingkat persentase pengelolaan sebesar 99,87%.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
2. Apakah kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambahkan wawasan penulis dalam bidang akuntansi terutama dalam hal kompetensi, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa
- b. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang yaitu mengenai kompetensi, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi Aceh khususnya di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan judul pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dengan tahun pengamatan 2019-2021.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007). Halim (2018:23) menyatakan bahwa : keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan SAL (LP SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pospos luar biasa.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan arus kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, juga berisi ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan

penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat..

Menurut Rosalinda (2016:5) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah

bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.1.2.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa, Darmiasih, et al. (2017:8). Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat kompetensi untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
5. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
6. Untuk pembinaan dan partisipasi masyarakat pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban

sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Wibisono (2018:6) akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (*Governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, *liability* dan *terminologi* lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat. Mardiasmo (2018:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Menurut Mahmudi (2018:23) akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah. Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Menurut Halim (2018:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Ulum (2017:42) tipe akuntabilitas dibeda menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggung jawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Menurut Supriatna (2017:102) akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratic accountability*, *professional accountability*, dan *legal accountability*, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan *politic accountability*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.

2. *Professional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.

3. *Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini menurut Mahmudi (2018:36) adalah:

1. Keakuratan yaitu teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan
2. Transparansi yaitu keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
3. Validitas yaitu sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk mengukur apa yang diukur
4. Relevansi yaitu kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan, dalam hal ini keuangan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa secara umum
5. Keandalan Informasi yaitu keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama, dalam pengelolaan keuangan desa dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

2.1.4 Kompetensi

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi

Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah. Menurut Hasibuan (2018:48) aparatur adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada organisasi dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Menurut Widjaja (2016:53) mengatakan bahwa aparatur adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). selanjutnya pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik dilembaga- lembaga pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia pegawai merupakan orang yang bekerja pada satu lembaga (kantor, organisasi) dengan mendapatkan gaji (upah).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi aparatur mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya Munawir (2017:33) mengatakan kompetensi aparatur adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil pelaksanaan tugas yang mengacu pada pengalaman langsung. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja para pegawai yang ada dalam organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar.

Menurut Sedarmayanti (2018:126), kompetensi aparatur adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Menurut Siagian (2017:173) kompetensi adalah merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan aktifitasnya kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang mempunyai hubungan kausalitas atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.

Sedarmayanti (2018:127) kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan

pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Oleh karena itu, jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Untuk kedepannya agar kualitas laporan keuangan daerah tersebut menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien harus ditata ulang kembali manajemennya dengan SDM yang ahli dalam bidangnya yaitu lebih mengutamakan aparat-aparat pemerintah yg berlatar belakang pendidikan akuntansi (Sedarmayanti, 2018:127).

Untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh prinsip etika (Mulyadi, 2018:58). Komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas :

1. Komponen pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu kompetensi.
2. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
3. Kemampuan berfikir merupakan kemampuan untuk mengakumulasi dan mengolah informasi. Karakteristik yang dapat dimasukkan sebagai unsure kemampuan berfikir adalah kemampuan beradaptasi pada situasi yang baru dan ambigu, perhatian terhadap fakta-fakta yang relevan dan kemampuan untuk mengabaikan fakta yang tidak relevan.

4. Strategi Penentuan Keputusan baik formal maupun informal akan membantu membuat keputusan yang sistematis dan membantu keahlian di dalam mengatasi keterbatasan manusia.

2.1.4.2 Indikator Kompetensi

Kompetensi aparatur adalah keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan lain-lain (Munawir, 2017:16). Indikator Kompetensi aparatur adalah sebagai berikut (Munawir, 2017:16):

- 1) Kemampuan
- 2) Keterampilan
- 3) Pemahaman
- 4) Pengetahuan

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

2.1.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2018:2), suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*), artinya suatu kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energy (Mardi: 2016:3).

Pengertian sistem pengendalian internal menurut Harrison *et al.* (2016:372) adalah suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan yang terkait yang diterapkan

oleh suatu entitas untuk menjaga aktiva, mendorong para karyawan untuk mengikuti kebijakan organisasi, meningkatkan efisiensi operasi organisasi dan memastikan keandalan pencatatan akuntansi.

Menurut Romney dan Steinbart (2018:229): “sistem pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.” Sedangkan menurut Mulyadi dalam buku Sistem Akuntansi (2018:163) mendefinisikan “sistem pengendalian internal (SPI) meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa system pengendalian Internal adalah rangkaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh organisasi guna menjamin kekayaan yang dimiliki oleh organisasi untuk keefisienan terhadap pelaporan keuangan dan para karyawan yang ada di dalam organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP dikatakan berhasil mencapai tujuannya apabila ditandai oleh eksistensi dua aspek, yaitu aspek desain pengendalian intern (*control design*) dan aspek penerapannya (*control implementation*). Aspek desain pengendalian terkait dengan masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Sedangkan aspek

penerapan menyangkut efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan (Mardi: 2016:3).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini diharapkan berperan dalam tiga hal: sebagai landasan pembinaan penyelenggaraan SPIP, landasan penyelenggaraan pengawasan intern dan standar penyelenggaraan SPIP.

Menurut Mulyadi (2018:163) tujuan pengendalian internal adalah “menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Harrison (2016:390). Pengendalian Internal adalah rencana organisasional dan semua tindakan terkait yang dirancang dengan tujuan :

1. Mengamankan aktiva
2. Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan organisasi
3. Meningkatkan efisiensi operasi
4. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian Internal adalah dapat melindungi asset organisasi dari penyalahgunaan dan menyediakan

keyakinan yang memadai untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta keandalan data akuntansi, guna meningkatkan efisiensi operasi organisasi terhadap keandalan laporan keuangan.

Rahayu dan Suhayati (2018:222) mengatakan hal yang sama mengenai jenis-jenis pengendalian Internal , pengendalian Internal dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Pengendalian Internal akuntansi
Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa:
 - a. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan
 - b. Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar, keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas harta organisasi
 - c. Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan
 - d. Jumlah aktiva dalam catatan dicocokkan dengan aktiva yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.
2. Pengendalian Internal administrative
Pengendalian Internal yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan organisasi.

2.1.5.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Agoes (2018:75) pengendalian internal terdiri dari beberapa indikator yang saling terkait berikut ini:

- a. Integritas dan nilai etika organisasi
- b. Parameter pengelolaan organisasi
- c. Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab
- d. Proses pengelolaan individu yang kompeten
- e. Ketegasaan untuk mendorong akuntabilitas kerja

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terdiri dari lima indikator, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern.

2.1.6 Partisipasi Masyarakat

2.1.6.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Handayani (2017:40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Menurut Supomo dan Indriantoro (2017:17) menyatakan partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut.

Menurut Tiwinarni (2017:18) partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan para karyawan dalam aspek-aspek mental dan emosional yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Bentuk partisipasi ini sebenarnya merupakan proses komunikasi atau teknik mendapatkan dan memanfaatkan umpan balik dari karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini pihak karyawan tidak memiliki otoritas mengambil keputusan karena yang berwewenang untuk suatu keputusan hanyalah prerogatif pihak manajemen. Karyawan hanyalah ikut dalam proses pengenalan atau identifikasi masalah, mengadakan monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya, melaporkan kegiatannya, dan menyarankan atau mengusulkan saran-saran pemecahan masalah. Menurut Slamet (2018:6), berdasarkan pengertian partisipasi, maka partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan konstribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Yuwono (2017:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

2.1.6.2 Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Rusni (2021:5) dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu:

1. Partisipasi untuk mengidentifikasi masalah.
Ini biasanya berkaitan dengan penentuan alternatif dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk terlibat dalam menentukan masalah, arah dan orientasi pembangunan.
2. Partisipasi untuk ikut dalam pengambilan keputusan.
Ini berkaitan dengan penentuan alternatif gagasan dan partisipasi semacam ini penting bagi masyarakat dalam menentukan arah dan orientasi pembangunan mereka.
3. Partisipasi untuk ikut dalam pelaksanaan program pembangunan
Pelaksanaan program pembangunan yang telah dirumuskan dalam rencana yang telah menjadi kesepakatan.
4. Partisipasi dalam evaluasi.
Ini kaitannya dengan pelaksanaan program secara menyeluruh, untuk mengetahui apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Susanti (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, kepatuhan pajak bendaharawan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Safitri (2020) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil yang diperoleh dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Gamaliel (2020) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Matani (2020) Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura. Tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura.

Perdana (2019) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten Bantul.

Aulia (2018) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Susanti, 2021)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, kepatuhan pajak bendaharawan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa	- Akuntabilitas pengelolaan dana desa - SIA - Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa - Partisipasi masyarakat - Teknik pengumpulan data	- Variabel kepatuhan pajak - Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. (Safitri, 2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil yang diperoleh dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	- Akuntabilitas pengelolaan dana desa - Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa - Partisipasi masyarakat - Teknik pengumpulan data	- Variabel komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi - Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data
3	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo (Gamaliel, 2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	- Akuntabilitas pengelolaan dana desa - Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa - Partisipasi masyarakat - Teknik pengumpulan data	- Variabel komitmen organisasi - Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura (Matani, 2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung. Tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura. Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di Kota Jayapura.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa SIA Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa Partisipasi masyarakat Teknik pengumpulan data	Variabel komitmen organisasi Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data
5	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. (Perdana, 2019)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten Bantul.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa Partisipasi masyarakat Teknik pengumpulan data	Variabel komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota (Aulia, 2019)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota	Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa Partisipasi masyarakat Teknik pengumpulan data	Variabel komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data

Sumber : Data diolah tahun 2022

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Hubungan Kompetensi dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan pula dengan teori stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang

aparatur. Kompetensi aparatur berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa (Gamaliel, 2020)..

2.3.2 Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Suatu sistem pengendalian SIA terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif mereka meringkas pengendalian internal entitas itu. Penerapan sistem pengendalian intern yang kurang baik akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu organisasi sehingganya sistem pengendalian intern menjadi sangat penting dalam suatu organisasi untuk menjaga kekayaan organisasi tersebut.

Sistem Pengendalian Intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah Organisasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang baik akan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari kesalahan salah saji. Semakin baik sistem pengendalian intern nya maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Hasil penelitian dari Susanti (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2.3.3 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

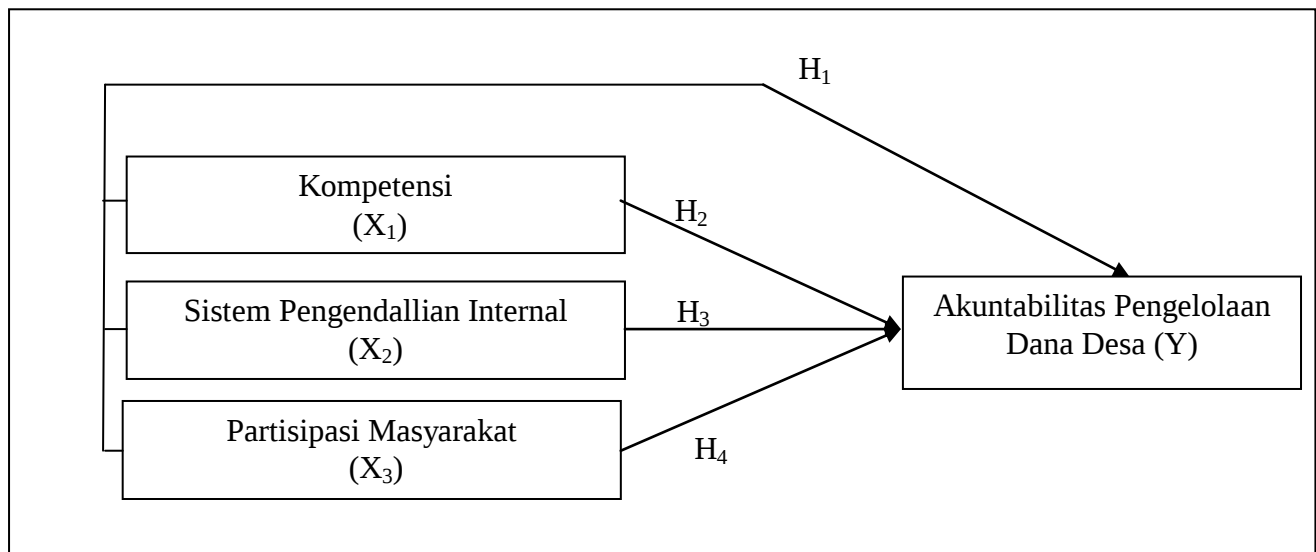
Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat berpengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa (Matani, 2020) dan Gamaliel (2020).

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Keterlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan,

dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hubungan antara variabel yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hubungan antara variabel penelitian dapat digambarkan pada Gambar 2.1:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Pemikiran Peneliti 2022

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

H₁: Kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H₂: Kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

- H₃: Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
- H₄: Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana di ungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2019:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu. Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran & Bougie (2019:52) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

1) Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis, studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih factor dalam situasi (Sekaran & Bougie, 2019:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

2) Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini ada studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab satu atau lebih masalah (Sekaran & Bougie, 2019:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

3) Tingkat intervensi peneliti terhadap studi

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti hanya menyebarkan kuisioner tanpa mengintervensi aktifitas normal terhadap kasus yang diteliti.

4) Situasi studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Peneliti ingin mengetahui kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu

situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data dilapangan.

5) Unit analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan daya yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2019:73). Unit analisis dalam penelitian ini adalah aparatur desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

6) Horizon waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional* yang mengumpulkan data hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur masing-masing di desa yang ada di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Metode sampel jenuh atau sensus dimana seluruh elemen populasi dijadikan sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian sensus/sampling jenuh. Dimana seluruh jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 aparatur desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan Supranto (2017). Metode sensus dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*), atau sering disebut parameter (Supranto, 2017). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 aparatur desa. Jumlah aparatur masing-masing desa yang ada Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nama Desa Di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

No	Perangkat Desa	Nama Desa			Jumlah Aparatur
		Pulau Balai	Pulau Baguk	Teluk Nibung	
1	Keuchik Gampong	1	1	1	3
2	Sekretaris Gampong	1	1	1	3
3	Kepala Dusun	4	4	4	12
4	Kaur Umum	1	1	1	3
5	Kaur Keuangan	1	1	1	3
6	Tuha Peut	6	6	6	18
Jumlah		14	14	14	42

Sumber: Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat dan reliabel. Sumber data yang digunakan antara lain (Sugiyono, 2018:139) data primer diperoleh dari dokumentasi dan daftar pertanyaan (kuisisioner). Untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup, yaitu pertanyaan yang dirancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka melalui artikel majalah pemasaran maupun yang diambil dari internet untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan langsung kuisisioner kepada responden. Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan ataupun pernyataan yang berhubungan dengan variabel-variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.4 Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu masing-masing variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa, variabel bebas yaitu kompetensi, Sistem pengendalian internal dan Partisipasi masyarakat.

Variabel-variabel tersebut dapat dilihat melalui Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Dependen Variabel					
1	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	Kewajiban pemerintah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah. (Mahmudi, 2018:23)	1. Keakuratan 2. Transparansi 3. Validitas 4. Relevan 5. Keandalan informasi (Mahmudi, 2018:23)	Likert	A-A5
Independen Variabel					
2	Kompetensi (X ₁)	Keahlian professional yang dimiliki oleh aparatur sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan lain-lain (Munawir, 2017:16)	1. Kemampuan 2. Keterampilan 3. Pemahaman 4. Pengetahuan (Munawir, 2017:16)	Likert	B1-B4

Lanjutan Tabel 3.2

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Independen Variabel					
3	Sistem pengendalian internal (X ₂)	sistem pengendalian internal adalah rangkaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh organisasi guna menjamin kekayaan yang dimiliki oleh organisasi untuk keefisienan terhadap pelaporan keuangan dan para karyawan yang ada di dalam organisasi. (Agoes, 2018:75)	1. Integritas dan nilai etika organisasi 2. Parameter pengelolaan organisasi 3. Struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab 4. Proses pengelolaan individu yang kompeten 5. Ketegasaan untuk mendorong akuntabilitas kerja (Agoes, 2018:75)	Likert	C1-C5
4	Partisipasi masyarakat (X ₃)	Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya (Rusni, 2021:5)	1. Partisipasi untuk mengidentifikasi masalah. 2. Partisipasi untuk ikut dalam pengambilan keputusan. 3. Partisipasi untuk ikut dalam pelaksanaan program pembangunan 4. Partisipasi dalam evaluasi. (Rusni, 2021:5)	Likert	D1-D4

Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5

dengan kategori menurut Arikunto (2019:66) adalah seperti pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3
Skala Likert

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistic Pagcket for Social Saince*) versi 22. Adapun persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

X₁ = Kompetensi

X₂ = Sistem pengendalian internal

X₃ = Partisipasi masyarakat

a = Konstanta

b = Parameter Regresi

e = *Error Term*

3.6 Pengujian Data

Uji reliabilitas dan validitas adalah uji terhadap instrumen penelitian yang akan menyajikan data kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang

digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersifat kualitatif sehingga harus dapat memberikan kebenaran dan kepercayaan melalui suatu set uji kehandalan dan validitas (Sugiyono, 2018).

3.6.1 Pengujian Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi, keperluan dan tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa kuesioner dianggap valid jika kuesioner tersebut benar-benar dapat menyajikan suatu set data mengenai perilaku dan aktivitas responden sebagaimana yang diharapkan. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) diantara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*) (Sugiyono, 2018).

3.6.2 Pengujian Kehandalan (Reliability)

Reliabilitas instrument adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner, meskipun digunakan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variabel yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya variansi atau perbedaan yang diharapkan pada seperangkat pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap suatu objek. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60 (Malhotra, 2018).

3.7 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis merupakan pelaksanaan alternatif jawaban untuk menjawab ke empat rumusan masalah dalam penelitian ini. Rancangan tersebut dalam penelitian alternatif (H_a), yaitu,

H_1 = Kompetensi, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

H_2 = Kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

H_3 = Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

H_4 = Partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara individu (parsial) :

H_{01} : Jika $\beta_1 = 0$, maka H_0 diterima (H_a ditolak), artinya kompetensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H_{01} : Jika $\beta_1 \neq 0$ maka H_a diterima (H_0 ditolak), artinya kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H_{o2} : Jika $\beta_2 = 0$, maka H_o diterima (H_a ditolak), artinya komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H_{o2} : Jika $\beta_2 \neq 0$ maka H_a diterima (H_o ditolak), artinya komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H_{o3} : Jika $\beta_3 = 0$, maka H_o diterima (H_a ditolak), artinya partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H_{o3} : Jika $\beta_3 \neq 0$ maka H_a diterima (H_o ditolak), artinya partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

3.7.2 Uji Secara Simultan

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara bersama-sama

- H_{o1} : Jika $\beta_i (i = 1, 2, 3) = 0$: maka H_o diterima (H_a ditolak). Artinya bahwa, variabel *independent* kompetensi, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*.
- H_{o1} : Jika $\beta_i (i = 1, 2, 3) \neq 0$, : maka H_a diterima (H_o ditolak). Artinya bahwa, variabel *independent* kompetensi, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan serta masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	a. 20-25 Tahun	2	4,8
	b. 26-31 Tahun	8	19,0
	c. 32-37 Tahun	5	11,9
	d. 38-43 Tahun	7	17,1
	e. 44-49 Tahun	11	26,2
	f. > 50 Tahun	9	21,4
Total		42	100
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	36	85,7
	b. Wanita	6	14,3
Total		42	100
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	9	21,4
	b. Menikah	33	78,6
Total		42	100
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. SLTA	18	42,9
	b. Diploma	5	11,9
	c. Sarjana	18	42,9
	d. Pasca Sarjana	1	2,4
Total		42	100

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 25 tahun yaitu sebanyak 2 responden atau 4,8%, yang berusia antara 26 sampai dengan 31 tahun yaitu sebanyak 8 responden atau 19,0%, yang berusia antara 32 sampai dengan 37 tahun yaitu sebanyak 6 responden atau 11,9%, yang berusia antara 38 sampai dengan 43 tahun yaitu sebanyak 7 responden atau 17,1%, yang berusia antara 44 sampai dengan 49 tahun sebanyak 11 responden atau 26,2% dan yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 9 responden atau 21,4%

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 36 responden atau 85,7% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 6 responden atau 14,3%. Kemudian Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 9 responden atau 21,4% dan yang sudah menikah sebanyak 33 responden atau 78,6%

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 18 responden atau 42,9%, yang berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 5 responden atau 11,9%, yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 18 responden atau 42,9% dan yang berpendidikan pasca sarjana sebanyak 1 responden atau 2,4%.

4.2. Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini mengamati tiga variabel bebas (*indenpendent variabel*) yaitu variabel kompetensi (X_1), variabel sistem pengendalian internal (X_2) dan variabel partisipasi masyarakat (X_3) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

4.2.1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Penjelasan responden tentang variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa pada dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Agar lebih akurat semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa	3	7,1	3	7,1	8	19,0	27	64,3	1	2,4	3,48
2	Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2	4,8	5	11,9	17	40,5	16	38,1	2	4,8	3,26
3	Rancangan peraturan desa tentang APBD desa disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.	2	4,8	3	7,1	19	45,2	15	35,7	3	7,1	3,33
4	Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan semua aparatur desa, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa serta relevan	2	4,8	3	7,1	17	40,5	16	38,1	4	9,5	3,40

Lanjutan Tabel 4.2

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
5	Aparatur desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	2	4,8	3	7,1	16	38,1	16	38,1	5	11,9	3,45
Rerata												3,39

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 pada indikator pertama bahwa Agar lebih akurat semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,48. Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,26. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,33. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan semua aparatur desa, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa serta relevan aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,40. Aparatur desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,45. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 3,39 artinya responden menyatakan kurang setuju karena skala likert berada pada satuan angka 3.

4.2.2. Variabel Kompetensi

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai kompetensi dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kompetensi

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Aparatur memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas	2	4,8	3	7,1	9	21,4	22	52,4	6	14,3	3,64
2	Keterampilan aparatur sesuai dengan jabatan aparatur saat ini	2	4,8	4	9,5	5	11,9	21	50,0	10	23,8	3,79
3	Aparatur memiliki pemahaman yang baik dalam menguasai tugas	0	0	2	4,8	7	16,7	18	42,9	15	35,7	4,10
4	Pengetahuan yang aparatur miliki dapat membantu pekerjaan aparatur	2	4,8	4	9,5	5	11,9	21	50,0	10	23,8	3,79
Rerata												3,83

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu aparatur memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,64. Keterampilan aparatur sesuai dengan jabatan aparatur saat ini aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,79. Aparatur memiliki pemahaman yang baik dalam menguasai tugas aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,10. Pengetahuan yang aparatur miliki dapat membantu pekerjaan aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,79. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel partisipasi masyarakat Kerja sebesar 3,83 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.2.3. Variabel Sistem Pengendalian Internal

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel sistem pengendalian internal dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Sistem Pengendalian Internal

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Aparatur mempunyai integritas dan nilai etika yang baik dalam berorganisasi	2	4,8	3	7,1	17	40,5	15	35,7	5	11,9	3,43
2	Parameter pengelolaan organisasi dapat mengukur kualitas informasi akuntansi	0	0	5	11,9	6	14,3	26	61,9	5	11,9	3,74
3	Setiap aparatur mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sendiri	1	2,4	8	19,0	13	31,0	14	33,3	6	14,3	3,38
4	Aparatur dapat meningkatkan proses pengelolaan individu yang kompeten dalam berorganisasi	2	4,8	3	7,1	16	38,1	16	38,1	5	11,9	3,45
5	Aparatur dapat meningkatkan tingkat ketegasan untuk mendorong akuntabilitas kerja	2	4,8	5	11,9	13	31,0	14	33,3	8	19,0	3,50
Rerata												3,50

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan indikator yang pertama aparatur mempunyai integritas dan nilai etika yang baik dalam berorganisasi aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,43. Parameter pengelolaan organisasi dapat mengukur kualitas informasi akuntansi aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,74. Setiap aparatur mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sendiri aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,38. Aparatur dapat meningkatkan proses pengelolaan individu yang kompeten

dalam berorganisasi aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,45. Aparatur dapat meningkatkan tingkat ketegasan untuk mendorong akuntabilitas kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,50. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 3,50 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.2.4. Variabel Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pelaksanaan sosialisasi atau kontribusi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa	3	7,1	3	7,1	10	23,8	19	45,2	7	16,7	3,57
2	Aparatur memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan	2	4,8	4	9,5	7	16,7	22	52,4	7	16,7	3,67
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa	1	2,4	2	4,8	8	19,0	18	42,9	13	31,0	3,95

Lanjutan Tabel 4.5

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban dan evaluasi yang dilakukan oleh aparatur	1	2,4	2	4,8	11	26,2	17	40,5	11	26,2	3,83
Rerata												3,76

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan dari indikator yang pertama bahwa pelaksanaan sosialisasi atau kontribusi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,57. Aparatur memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,67. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,95. Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban dan evaluasi yang dilakukan oleh aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel variabel partisipasi masyarakat sebesar 3,76 artinya responden menyatakan kurang setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.3.1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlation* dengan

bantuan SPSS. Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,304, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=42)	Ket
1	A1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,498	0,304	Valid
2	A2		0,511		Valid
3	A3		0,805		Valid
4	A4		0,825		Valid
5	A5		0,855		Valid
6	B1	Kompetensi	0,705	0,304	Valid
7	B2		0,909		Valid
8	B3		0,560		Valid
9	B4		0,909		Valid
10	C1	Sistem Pengendalian Internal	0,760	0,304	Valid
11	C2		0,490		Valid
12	C3		0,415		Valid
13	C4		0,787		Valid
14	C5		0,480		Valid
15	D1	Partisipasi Masyarakat	0,775	0,304	Valid
16	D2		0,752		Valid
17	D3		0,548		Valid
18	D4		0,481		Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,304 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal *consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

No	Variabel	Nilai Minimal Kehandalan	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,60	0,869	Handal
2.	Kompetensi (X ₁)	0,60	0,893	Handal
3.	Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,60	0,778	Handal
4.	Partisipasi Masyarakat (X ₃)	0,60	0,796	Handal

Sumber : data diolah 2023

Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai *cronbach alpha reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpha* 0,80 atau di atasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel dependen berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.4. Hasil Penelitian

4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.8
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,453	0,695		3,529	0,000
kompetensi (X_1)	0,271	0,094	0,337	2,883	0,004
sistem pengendalian internal (X_2)	0,411	0,082	0,566	5,012	0,000
partisipasi masyarakat (X_3)	0,249	0,099	0,307	2,515	0,014

a. Dependent Variable: akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 2,453 + 0,271X_1 + 0,411X_2 + 0,249X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 2,453 artinya bila mana kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3), dianggap konstan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 2,453 pada satuan skala likert

- b. Koefisien regresi kompetensi (X_1) sebesar 0,271. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel kompetensi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sebesar 27,1%.
- c. Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X_2) sebesar 0,411. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel sistem pengendalian internal secara relatif akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sebesar 41,1%.
- d. Koefisien regresi partisipasi masyarakat (X_3) sebesar 0,249. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel partisipasi masyarakat secara relatif akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sebesar 24,9%.

4.4.2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain.

Tabel 4.9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,844 ^a	0,713	0,690	0,42033

a. Predictors: (Constant), partisipasi masyarakat (X_3), sistem pengendalian internal (X_2), kompetensi (X_1)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas maka diperoleh koefisien korelasi (R) dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,844 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 84,4%. Artinya faktor kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), dan partisipasi masyarakat (X_3) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Sementara itu koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,690 artinya bahwa sebesar 69% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan kompetensi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_3). Sedangkan selebihnya sebesar 31% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas.

4.4.3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama maupun secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

4.4.3.1. Pengujian Secara Bersama-Sama

H_1 ; $\beta_1 = 0,271$, $\beta_2 = 0,411$, $\beta_3 = 0,249$, maka $\beta_1 \neq 0$, $\beta_2 \neq 0$, $\beta_3 \neq 0$, : Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat

secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

4.4.3.2. Pengujian Secara Parsial

H2 : $H_1 : \beta_1 = 0,271, \beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H3 : $H_2 : \beta_2 = 0,411, \beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

H3 : $H_3 : \beta_3 = 0,249, \beta_3 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengujian secara bersama-sama dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat bersama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Susanti (2021) dan Matani (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya kompetensi aparatur yang tinggi, sistem pengendalian internal yang tepat dan adanya partisipasi masyarakat maka dapat berdampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.5.2. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk kompetensi adalah sebesar 0,271 yang berarti kompetensi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,271 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Safitri (2020), Gamaliel (2020) dan Aulia (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin meningkat kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga kompetensi aparatur pada penting demi kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

4.5.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,411 yang berarti sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Hasil analisis menunjukkan nilai β_2 sebesar 0,411 dengan hasil perhitungan $\beta_2 \neq 0$, dapat disimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Matani (2020) dan Susanti (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan di desa maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini penerapan sistem pengendalian sistem pengendalian internal yang tepat dapat melancarkan bagi aparatur dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa

4.5.4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk partisipasi masyarakat adalah sebesar 0,249 yang berarti partisipasi masyarakat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Hasil analisis menunjukkan nilai β_3 sebesar 0,249 dengan hasil perhitungan $\beta_3 \neq 0$, dapat disimpulkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Aulia (2019), Perdana (2019) dan Matani (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kepada aparatur maka semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya kepada aparatur sangat penting demi kelancaran dalam mempertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat berpartisipasi terhadap pembangunan desa serta selalu ikut sertakan ketika aparaturnya mengadakan rapat desa.

2. Disarankan aparatur desa kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat meningkatkan pengetahuan agar kompetensi aparatur desa dapat mengelola dana desa dengan baik
3. Disarankan masyarakat Desa di kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat memberikan dukungan atau partisipasi kepada aparatur dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak berfokus kepada variabel partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa dan pengawasan aparatur desa saja, tapi juga meneliti variabel lainnya seperti pengendalian intern, sumber daya manusia dan sistem akuntansi desa.
5. Penelitian selanjutnya dapat menambah populasi dan sampel yang lebih banyak lagi karena penelitian ini yang menjadi sampel hanya keuchik gampong, sekretaris gampong, kepada dusun, kaur umum, kaur keuangan dan tuha peut

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agoes, S. (2018) *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aulia, Putri. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-15*
- Aulia, Putri. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-15*
- Baridwan, Zaki. (2018). *Sistem Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Burhanuddin, Kiyai. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 1.
- Darmiasih, N.K. (2017). *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Gamaliel, Hendrik. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-10*
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Harrison Jr, Walter T (2016). *Akuntansi Keuangan (Internasional Financial Reporting Standarts – IRFS)*. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, M. (2017) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), (2018). *Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)*, Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2018). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mardi. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 535-547*.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marschall B. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Alihbahasa : Kikin Sakinah.
- Matani, Cornelea. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Dikota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Vol. 5, No. 3, Hlm 21-45
- Mulyadi. (2018). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Munawir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4. Yogyakarta: Liberty
- Murhaini, Suriansyah (2016) *Manajemen Pengawasan Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Indeks Desa Membangun*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan desa*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Perdana, K. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

- Perdana, Khaeril. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-11
- Rahayu, S. K. & Ely, S. (2018). *Auditing*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Romney, B. M. dan Paul, J. S. (2016). *Accounting Information System*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rusni. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Good Governance Di Desa Ciro-Ciro E, kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Prodi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Safitri, Devi. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No. 4, Hlm 330-342
- Santoso, Singgih. (2016). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sedarmayanti. (2018). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sekaran, U. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, S. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Slamet, M. (2018). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press
- Sugiyono. (2018). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sunyoto. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku.
- Supomo dan Indriantoro, Nur (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta.
- Susanti, R. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Hlm 1-10
- Sutrisno , Edy. (2016) *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Suwatno. (2018). *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta

- Syariati, Namla. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Enterprise Theory. *ISAFIR Islamic Accounting and Finance Review*, Volume 3, Nomor 1.
- Tiwinarni. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1): 1-13
- Ulum, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)*
- Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Universitas Negeri Semarang*, 1 (1): 1-10.
- Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, T. (2016). *Memahami Konsep Pengendalian Internal*. Jakarta: Harvaindo.
- Yuwono, Teguh. (2017). *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University.

NO:

Lampiran 1 Kuisisioner

Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah untuk mendapatkan data bagi penulis skripsi pada fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya sangat menghargai bantuan saudara-saudari yang telah menjawab semua pertanyaan dengan kondisi yang berlaku pada saudara-saudari sendiri. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

A. indentitas responden

1. Umur

- a. 20-25 Tahun ☐
- b. 26-31 Tahun ☐
- c. 32-37 Tahun ☐
- d. 38-43 Tahun ☐
- e. 44-49 Tahun ☐
- f. ≥ 50 Tahun ☐

2. Jenis kelamin

- a. Pria ☐
- b. Wanita ☐

3. Status perkawinan

- a. Belum menikah ☐
- b. Menikah ☐

4. Tingkat Pendidikan

- a. SLTA ☐
- b. Diploma III ☐
- c. Sarjana (S1) ☐
- d. Pasca Sarjana (S2) ☐
- e. Doktor (S3) ☐

B. Indikator Variabel

Ket : 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Agar lebih akurat semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa					
2	Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
3	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan.					
4	Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan semua aparatur desa, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa serta relevan					
5	Apartur desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib					

2. Variabel Kompetensi (X₁)

No	Penyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas					
2	Keterampilan saya sesuai dengan jabatan saya saat ini					
3	Saya memiliki pemahaman yang baik dalam menguasai tugas					
4	Pengetahuan yang saya miliki dapat membantu pekerjaan saya					

3. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Aparatur mempunyai integritas dan nilai etika yang baik dalam berorganisasi					
2	Parameter pengelolaan organisasi dapat mengukur kualitas informasi akuntansi					
3	Setiap aparatur mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sendiri					
4	Aparatur dapat meningkatkan proses pengelolaan individu yang kompeten dalam berorganisasi					
5	Aparatur dapat meningkatkan tingkat ketegasan untuk mendorong akuntabilitas kerja					

4. Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pelaksanaan sosialisasi atau kontribusi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa					
2	Aparatur memberikan kesempatan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan					
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa					
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban dan evaluasi yang dilakukan oleh aparatur					

NO	Karakteristik				Indikator					Y	Indikator				X ₁	Indikator					X ₂	Indikator				X ₃
	IR1	IR2	IR3	IR4	A1	A2	A3	A4	A5		B1	B2	B3	B4		C1	C2	C3	C4	C5		D1	D2	D3	D4	
1	6	2	2	1	2	3	3	3	3	2,8	4	2	4	2	3	3	2	2	3	2	2,4	1	2	1	3	1,75
2	6	2	2	1	3	2	3	3	3	2,8	2	2	3	2	2,3	3	4	2	3	4	3,2	2	2	3	3	2,5
3	3	1	2	3	4	3	3	3	3	3,2	2	3	5	3	3,3	3	4	3	3	3	3,2	2	3	5	1	2,75
4	4	1	2	3	4	3	4	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3,8	4	4	4	2	3,5
5	4	1	2	3	4	4	3	3	3	3,4	4	4	3	4	3,8	3	4	3	3	5	3,6	4	4	3	5	4
6	4	1	2	1	4	3	4	4	4	3,8	4	4	3	4	3,8	4	3	4	4	3	3,6	4	4	4	4	4
7	6	1	2	1	4	3	4	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4,2	3	4	4	3	3,5
8	5	1	2	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3,8	4	4	2	4	3	3,4	4	4	4	4	4
9	4	1	2	3	4	3	4	4	4	3,8	3	4	4	4	3,8	4	4	4	4	3	3,8	4	4	4	3	3,75
10	5	1	2	4	1	1	2	2	2	1,6	1	1	2	1	1,3	2	3	1	2	2	2	3	4	4	4	3,75
11	3	1	2	1	1	2	3	3	3	2,4	1	2	4	2	2,3	3	2	4	3	3	3	1	1	2	3	1,75
12	5	1	2	1	4	4	3	3	3	3,4	2	3	4	3	3	3	4	2	3	4	3,2	1	2	4	2	2,25
13	2	1	1	2	3	4	1	1	1	2	3	1	2	1	1,8	1	2	3	1	3	2	2	3	4	4	3,25
14	6	1	2	1	4	4	3	3	3	3,4	3	3	4	3	3,3	3	4	3	3	3	3,2	3	1	2	4	2,5
15	5	1	2	3	4	3	4	4	4	3,8	3	4	4	4	3,8	4	4	3	4	1	3,2	3	3	4	4	3,5
16	4	1	2	1	3	2	4	4	4	3,4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3,6	3	4	4	4	3,75
17	5	1	2	1	4	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3,8	3	3	4	3	4	3,4	3	4	4	4	3,75
18	3	1	2	3	4	3	3	3	3	3,2	4	4	3	4	3,8	3	4	2	3	2	2,8	4	4	3	4	3,75
19	2	1	1	1	4	4	3	3	3	3,4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3,2	4	4	4	3	3,75
20	1	1	1	1	4	3	4	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,8	4	3	4	4	3,75
21	2	1	2	2	1	3	3	3	3	2,6	4	3	4	3	3,5	3	4	2	3	2	2,8	4	4	5	5	4,5
22	5	2	2	3	4	4	3	3	3	3,4	4	4	5	4	4,3	3	4	4	3	3	3,4	3	4	3	4	3,5
23	2	1	1	3	4	3	3	3	3	3,2	3	4	3	4	3,5	3	4	3	3	3	3,2	3	2	5	3	3,25
24	5	1	2	3	2	1	1	1	1	1,2	3	2	5	2	3	1	5	3	1	4	2,8	4	5	5	4	4,5
25	6	1	2	1	5	4	2	2	2	3	4	5	5	5	4,8	2	3	4	2	2	2,6	4	5	4	3	4
26	6	2	2	1	4	4	3	3	3	3,4	4	5	4	5	4,5	3	3	4	3	1	2,8	4	4	4	4	4
27	4	1	2	1	3	3	4	4	4	3,6	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	3,8	4	5	5	5	4,75
28	2	1	1	1	4	3	4	4	4	3,8	4	5	5	5	4,8	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5
29	3	1	2	3	4	4	5	5	5	4,6	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4,8	5	4	5	5	4,75
30	6	1	2	2	2	3	3	3	3	2,8	5	4	5	4	4,5	3	2	3	3	4	3	4	4	5	5	4,5
31	6	1	2	3	3	3	4	4	4	3,6	4	4	5	4	4,3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
32	5	2	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	5	4	5	5	5	4	4,75
33	5	1	2	3	3	2	2	2	2	2,2	5	5	5	5	5	2	2	3	2	4	2,6	5	4	4	4	4,25
34	2	1	1	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4,3	3	3	5	3	4	3,6	4	4	5	5	4,5
35	4	1	2	1	4	5	5	5	5	4,8	4	4	5	4	4,3	5	5	4	5	4	4,6	4	3	3	5	3,75
36	6	1	2	1	4	4	5	5	5	4,6	3	3	3	3	3	5	4	4	5	4	4,4	4	4	5	5	4,5
37	5	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,8	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
38	1	1	1	3	4	4	4	4	5	4,2	4	4	5	4	4,3	4	5	5	5	3	4,4	4	4	3	4	3,75
39	3	2	2	1	3	4	4	4	4	3,8	4	5	5	5	4,8	4	4	4	4	3	3,8	5	5	5	3	4,5
40	2	1	1	2	4	3	3	5	4	3,8	4	5	5	5	4,8	5	5	5	4	4	4,6	3	3	3	5	3,5
41	2	1	1	2	4	5	3	3	4	3,8	4	5	4	5	4,5	3	4	5	4	5	4,2	5	4	4	3	4
42	5	1	2	3	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4

Lampiran 3 Identitas Responden

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25 tahun	2	4,8	4,8	4,8
	26-31 tahun	8	19,0	19,0	23,8
	32-37 tahun	5	11,9	11,9	35,7
	38-43 tahun	7	16,7	16,7	52,4
	44-49 tahun	11	26,2	26,2	78,6
	> 50 tahun	9	21,4	21,4	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	36	85,7	85,7	85,7
	Wanita	6	14,3	14,3	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menikah	9	21,4	21,4	21,4
	Menikah	33	78,6	78,6	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	18	42,9	42,9	42,9
	Diploma	5	11,9	11,9	54,8
	Sarjana	18	42,9	42,9	97,6
	Pasca Sarjana	1	2,4	2,4	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	7,1	7,1	7,1
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	14,3
	Kurang Setuju	8	19,0	19,0	33,3
	Setuju	27	64,3	64,3	97,6
	Sangat Setuju	1	2,4	2,4	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	5	11,9	11,9	16,7
	Kurang Setuju	17	40,5	40,5	57,1
	Setuju	16	38,1	38,1	95,2
	Sangat Setuju	2	4,8	4,8	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	11,9
	Kurang Setuju	19	45,2	45,2	57,1
	Setuju	15	35,7	35,7	92,9
	Sangat Setuju	3	7,1	7,1	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	11,9
	Kurang Setuju	17	40,5	40,5	52,4
	Setuju	16	38,1	38,1	90,5
	Sangat Setuju	4	9,5	9,5	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	11,9
	Kurang Setuju	16	38,1	38,1	50,0
	Setuju	16	38,1	38,1	88,1
	Sangat Setuju	5	11,9	11,9	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Lampiran 5 Persentase Kompetensi (X₁)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	11,9
	Kurang Setuju	9	21,4	21,4	33,3
	Setuju	22	52,4	52,4	85,7
	Sangat Setuju	6	14,3	14,3	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	4	9,5	9,5	14,3
	Kurang Setuju	5	11,9	11,9	26,2
	Setuju	21	50,0	50,0	76,2
	Sangat Setuju	10	23,8	23,8	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Kurang Setuju	7	16,7	16,7	21,4
	Setuju	18	42,9	42,9	64,3
	Sangat Setuju	15	35,7	35,7	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	4	9,5	9,5	14,3
	Kurang Setuju	5	11,9	11,9	26,2
	Setuju	21	50,0	50,0	76,2
	Sangat Setuju	10	23,8	23,8	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Lampiran 6 Persentase Sistem Pengendalian Internal (X₂)

c1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	11,9
	Kurang Setuju	17	40,5	40,5	52,4
	Setuju	15	35,7	35,7	88,1
	Sangat Setuju	5	11,9	11,9	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	11,9	11,9	11,9
	Kurang Setuju	6	14,3	14,3	26,2
	Setuju	26	61,9	61,9	88,1
	Sangat Setuju	5	11,9	11,9	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,4	2,4	2,4
	Tidak Setuju	8	19,0	19,0	21,4
	Kurang Setuju	13	31,0	31,0	52,4
	Setuju	14	33,3	33,3	85,7
	Sangat Setuju	6	14,3	14,3	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	11,9
	Kurang Setuju	16	38,1	38,1	50,0
	Setuju	16	38,1	38,1	88,1
	Sangat Setuju	5	11,9	11,9	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	5	11,9	11,9	16,7
	Kurang Setuju	13	31,0	31,0	47,6
	Setuju	14	33,3	33,3	81,0
	Sangat Setuju	8	19,0	19,0	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Lampiran 7 Persentase Partisipasi Masyarakat (X₃)

D1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	7,1	7,1	7,1
	Tidak Setuju	3	7,1	7,1	14,3
	Kurang Setuju	10	23,8	23,8	38,1
	Setuju	19	45,2	45,2	83,3
	Sangat Setuju	7	16,7	16,7	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,8	4,8	4,8
	Tidak Setuju	4	9,5	9,5	14,3
	Kurang Setuju	7	16,7	16,7	31,0
	Setuju	22	52,4	52,4	83,3
	Sangat Setuju	7	16,7	16,7	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,4	2,4	2,4
	Tidak Setuju	2	4,8	4,8	7,1
	Kurang Setuju	8	19,0	19,0	26,2
	Setuju	18	42,9	42,9	69,0
	Sangat Setuju	13	31,0	31,0	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

D4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,4	2,4	2,4
	Tidak Setuju	2	4,8	4,8	7,1
	Kurang Setuju	11	26,2	26,2	33,3
	Setuju	17	40,5	40,5	73,8
	Sangat Setuju	11	26,2	26,2	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Lampiran 8 Reliability & Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,869	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,48	,943	42
A2	3,26	,912	42
A3	3,33	,902	42
A4	3,40	,939	42
A5	3,45	,968	42

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	13,45	10,351	,498	,887
A2	13,67	10,423	,511	,883
A3	13,60	9,076	,805	,813
A4	13,52	8,792	,825	,807
A5	13,48	8,499	,855	,797

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16,93	14,263	3,777	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	116,957	41	2,853		
Within People					
Between Items	1,305	4	,326	,870	,483
Residual	61,495	164	,375		
Total	62,800	168	,374		
Total	179,757	209	,860		

Grand Mean = 3,39

Lampiran 9 Reliability & Validitas Kompetensi (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,893	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3,64	,983	42
B2	3,79	1,071	42
B3	4,10	,850	42
B4	3,79	1,071	42

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	11,67	7,350	,705	,884
B2	11,52	6,109	,909	,803
B3	11,21	8,563	,560	,928
B4	11,52	6,109	,909	,803

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,31	12,073	3,475	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	123,744	41	3,018		
Within People	4,589	3	1,530	4,744	,004
Between Items	39,661	123	,322		
Residual	44,250	126	,351		
Total	167,994	167	1,006		

Grand Mean = 3,83

Lampiran 10 Reliability & Validitas Sistem Pengendalian Internal (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,778	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3,43	,966	42
C2	3,74	,828	42
C3	3,38	1,035	42
C4	3,45	,968	42
C5	3,50	1,088	42

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	14,07	7,726	,760	,664
C2	13,76	9,552	,490	,758
C3	14,12	9,083	,415	,784
C4	14,05	7,607	,787	,654
C5	14,00	9,073	,480	,800

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17,50	12,744	3,570	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	104,500	41	2,549		
Within People					
Between Items	3,286	4	,821	1,453	,219
Residual	92,714	164	,565		
Total	96,000	168	,571		
Total	200,500	209	,959		

Grand Mean = 3,50

Lampiran 11 Reliability & Validitas Partisipasi Masyarakat (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,796	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3,57	1,085	42
D2	3,67	1,028	42
D3	3,95	,962	42
D4	3,83	,961	42

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	11,45	5,132	,775	,651
D2	11,36	5,455	,752	,668
D3	11,07	6,507	,548	,772
D4	11,19	7,231	,481	,845

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,02	10,121	3,181	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	103,744	41	2,530		
Within People	3,637	3	1,212	2,344	,076
Between Items	63,613	123	,517		
Residual	67,250	126	,534		
Total	170,994	167	1,024		

Grand Mean = 3,76

Lampiran 12 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Partisipasi Masyarakat (X3), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kompetensi (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,844 ^a	,713	,690	,42033

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kompetensi (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,678	3	5,559	31,465	,000 ^b
	Residual	6,714	38	,177		
	Total	23,391	41			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kompetensi (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,453	,695		3,529	,000
	Kompetensi (X1)	,271	,094	,337	2,883	,004
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	,411	,082	,566	5,012	,000
	Partisipasi Masyarakat (X3)	,249	,099	,307	2,515	,014

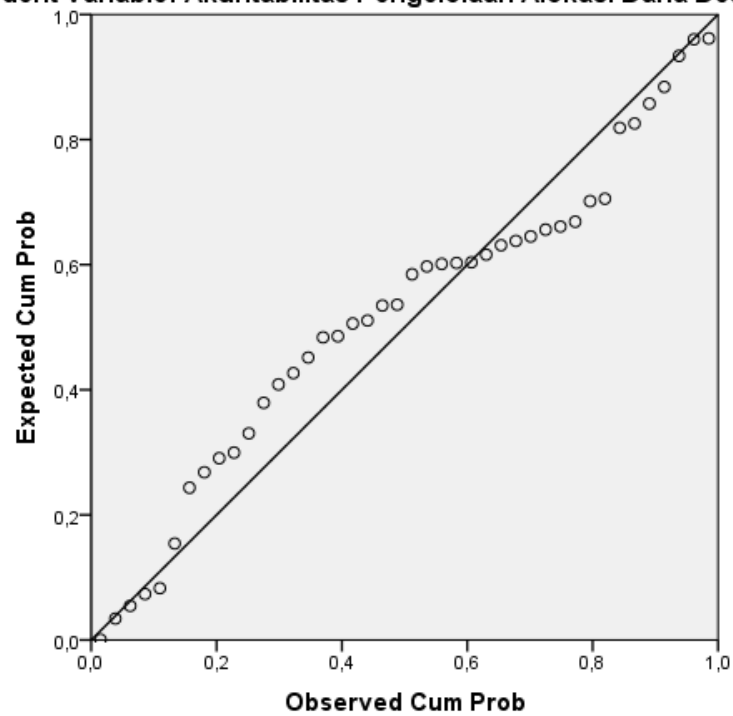
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi (X1)	,513	1,948
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	,669	1,494
	Partisipasi Masyarakat (X3)	,689	1,451

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)



Scatterplot

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

